

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktifitas perekonomian. Semakin tinggi belanja modal, semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktifitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yustikasari dalam jurnalnya pada tahun (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini mengindikasikan pentingnya alokasi belanja untuk berbagai kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanja yang selama ini belanja daerah digunakan untuk kegiatan belanja operasi yang relatif kurang produktif dari pada belanja modal, kondisi ini dapat dilihat dari data rata-rata realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015.

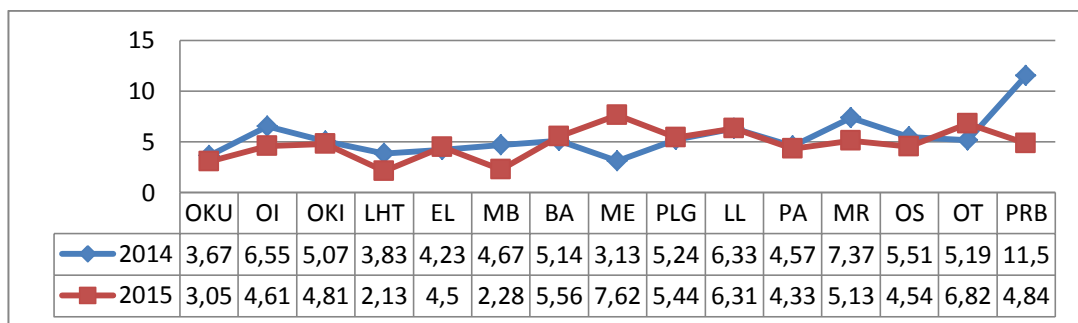
Tabel 1.1
Perbandingan Belanja Daerah dan Klasifikasinya pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 (dalam jutaan
rupiah)

Kab/Kota di Sumatera Selatan	Belanja Daerah	Belanja Operasi (BO)	Belanja Modal (BM)	Belanja Tak Terduga (BT)	% BO	% BM	% BT
Ogan Komering Ulu	1.085.467	861.562	223.476	428	79,37	20,59	0,04
Ogan Ilir	964.153	753.487	210.013	652	78,15	21,78	0,07
Ogan Komering Ilir	1.745.362	1.109.966	474.153	175	63,59	27,17	0,01
Lahat	1.559.989	1.086.638	471.385	1.965	69,66	30,22	0,12
Empat Lawang	757.424	410.636	279.728	15.125	54,21	36,93	1,99
Musi Banyuasin	1.899.319	1.490.801	408.512	5	78,49	21,51	0,01
Banyuasin	1.540.083	1.100.675	439.408	0,00	71,47	28,53	0
Muara Enim	2.112.376	1.306.530	600.742	4.071	61,85	28,44	0,19
Palembang	2.868.750	2.238.917	628.995	837	78,04	21,93	0,02
Lubuk Linggau	821.639	605.537	215.943	159	73,70	26,28	0,02
Pagar Alam	795.537	517.532	276.894	1.110	65,05	34,80	0,14
Musi Rawas	1.405.099	955.666	448.752	180	68,01	31,93	0,01
OKU Selatan	925.258	551.363	372.452	1.442	59,59	40,25	0,15
OKU Timur	1.158.799	950.911	207.580	307	82,06	17,91	0,02
Prabumulih	922.580	622.984	299.372	223	67,52	32,44	0,02
Rata-rata (Avrg) =	1.370.789	970.880	370.494	1.779	70,05	28,05	0,19

Sumber: Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata persentase belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 28,05%, dan rata-rata persentase belanja tak terduga terhadap belanja daerah hanya sebesar 0,19% sedangkan rata-rata persentase belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 70,05%. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, dan diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal, maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukuran keberhasilan program pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro. Angka-angka PDRB sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambar 1.1, merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel

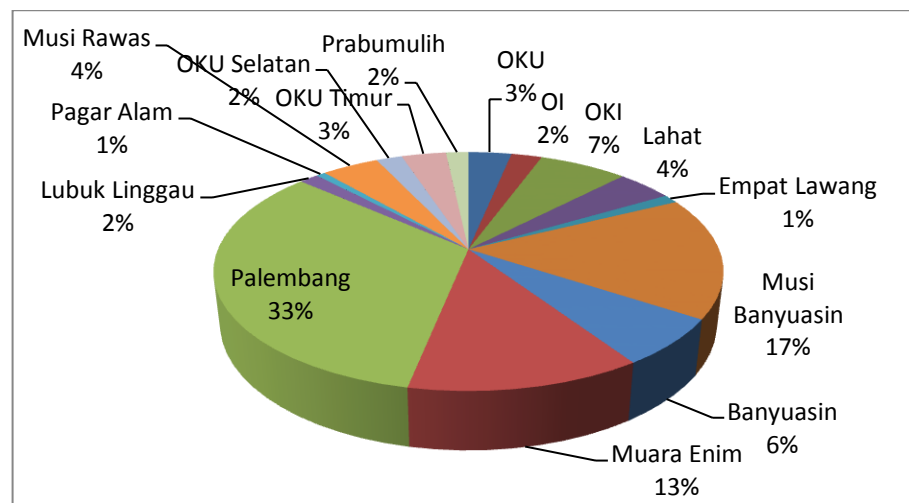
Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumsel 2014-2015 (%)

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang sebesar 5,24%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Palembang hanya sebesar 5,44%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kota Palembang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2014 (4,67%) mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 2,28%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Prabumulih turun drastis, pada tahun 2014 sebesar 11,5% menjadi 4,84%. (*sumsel.bps.go.id*).

Secara umum, setiap wilayah mempunyai karakteristik ekonomi yang berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam

tahap selanjutnya, kebijakan pemerintah pada pembangunan ekonomi didasarkan pada potensi daerah masing-masing. Potensi suatu daerah dimiliki dengan keberadaan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Kemandirian daerah dapat dihitung melalui rasio, dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi:2017).

Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi pertambangan migas di kabupaten Musi Banyuasin mencapai lebih dari 50% dari total migas di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim dan Lahat memiliki potensi pada sektor pertambangan dan penggalian batu bara. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Musi Rawas dan Banyuasin memiliki potensi yang mirip yaitu pada sektor pertanian. Berikut Keadaan ini dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota

Gambar 1.2
Distribusi Perekonomian Kab/Kota Provinsi Sumsel Tahun 2015

Berdasarkan gambar 1.2, Kota Palembang merupakan daerah yang mempunyai kontribusi perekonomian terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai 32,14%. Pembangunan infrastruktur yang cenderung cepat sehingga memicu pergerakan perekonomian secara luas di Kota Palembang. Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai potensi migas menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 15,97%. Kabupaten Muara Enim yang mempunyai potensi batu bara memberikan kontribusi sebesar 12,14%. Kabupaten OKI yang mempunyai potensi pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,46%, dan untuk Kabupaten Banyuasin dengan potensi migasterbesar kedua memiliki kontribusi sebesar 6,61%. Sementara Kabupaten/Kota lainnya memberikan kontribusi dibawah 5% (*PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota*).

Sumber penerimaan daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DBH merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Suprayitno (2015) dan Nora, dkk (2015) dengan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Suprayitno mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.

Sedangkan penelitian Nora, dkk mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap

Belanja Modal, menemukan bahwa Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dengan hasil temuan penelitian yang berbeda-beda, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai PDRB, PAD, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan ini diberi judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada butir 1.1, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran belanja modal secara bersama-sama pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan serta belanja modal.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di

masa yang akan datang, sehubungan dengan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal.